

KUASA BAJINGAN DALAM POLITIK DESA
(Studi tentang Dominasi Bajingan dalam Stabilitas Pemerintahan Desa di Desa
Nyabakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

RIYAN HIDAYAT ANNURI

NIM: E04213087

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Riyan Hidayat Annuri** ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laili Bariroh', written in a cursive style.

Laili Bariroh, M. Si.

NIP. 197711032009122002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi oleh Riyan Hidayat Annuri (E04213087) ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi,

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Plt. Dekan,

Dr. Suhermanto, M.Hum.
NIP. 196708201995031001

Tim Penguji:

Ketua,

Lali Bariroh, M. Si.
NIP. 197711032009122002

Sekretaris,

Anas Fakhruddin, M. Si.
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M. Si.
NIP. 196909071994032001

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, M. Si.
NIP. 197202062007101003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Riyan Hidayat Annuri

Nim : E04213087

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



RIYAN HIDAYAT ANNURI

NIM: E04213087



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riyan Hidayat Annuri
NIM : EO4213087
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Dan Filsafat / Politik Islam
E-mail address : Riyanhidayat.annuri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kuasa Bajingan Dalam Politik Desa (Studi tentang Dominasi
Bajingan dalam Stabilitas Pemerintah Desa di Desa Myabakan
Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Riyan Hidayat A)
nama terang dan tanda tangan

Pada konteks tersebut, Nyabakan Barat sebagai desa dengan keanekaragamannya mempunyai masalah keamanan dan stabilitas desa. Dari kurun waktu ke waktu kepemimpinan berganti, namun masalah keamanan dan stabilitas desa menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Nyabakan Barat. Masalah keamanan dimaksud berupa pencurian, pembegalan, bahkan perampokan. Korbannya pun tidak pilih-pilih dan barang yang dicuri bisa berupa barang berharga seperti emas dan berlian, sepeda motor, sapi ternak, bahkan sampai barang yang terkecil berupa hewan ternak lainnya dan pompa air.

Masalah stabilitas dan keamanan desa ini membuat masyarakat Nyabakan Barat mempunyai pemikiran bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan stabilitas dan keamanan desa. sehingga dari tahap awal aktivitas politik dan pemerintahan harus ada ketersinambungan dan keterkaitan hubungan pemerintahan desa dengan para preman maling dimaksud. Dalam hal ini dimaksudkan agar siapa saja yang mencalonkan kepala desa, harus mendatangi semua elit preman maling dan mulai bekerja sama dengan *deal-deal* politik tertentu. Biasanya berupa kompensasi keamanan yang sangat merugikan pihak pemerintahan desa.

Kepala Desa Nyabakan Barat saat ini mampu menjalin hubungan dengan para elit preman maling. Artinya mempunyai koordinasi yang jelas dengan para preman maling, dan meminta untuk bekerja sama mewujudkan keamanan dan stabilitas desa. namun tentu itu tidak gratis. Karena hampir setiap minggu elit preman maling yang demikian banyak bertandang ke rumah kepala desa untuk bertamu, yang setidaknya para preman maling ini mengharap uang kompensasi

keamanan dan stabilitas pemerintahan desa. Permintaan tersebut biasa berupa uang yang kisaran nominalnya dari Rp. 50.000-4.000.000.000. jika sudah demikian stabilitas dan keamanan desa sudah mulai bisa dikendalikan, walau harus mengorbankan banyak uang untuk menebusnya dari para elit preman maling.

Masalah stabilitas dan keamanan desa ini adalah inti dari keseimbangan dan integritas politik pemerintahan desa. Jika stabilitas dan keamanan desa mampu dikendalikan maka, pemerintahan desa dianggap sudah bisa mensejahterakan rakyat Nyabakan Barat. Barometer praktis kesejahteraan ini hanya berlaku untuk masyarakat yang mempunyai masalah keamanan dan stabilitas desa, seperti di Desa Nyabakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Kemudian ini menarik postulat peneliti bahwa ada hegemoni elit preman dalam politik pemerintahan desa yang memanfaatkan isu keamanan dan stabilitas desa. hal ini menarik perhatian peneliti untuk mulai menganalisis dinamika peran dan kuasa para elit preman maling Desa Nyabakan Barat utamanya dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan politik pemerintahan di Desa Nyabakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut,

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu

Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of role*). Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif.

Tinggi-rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pekerjaan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, tetapi perlu diakui bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi belum proporsional sifatnya, padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri, misalnya, lebih mementingkan kedudukan daripada perannya, dia akan menuntut warga masyarakat untuk lebih banyak melayaninya (padahal peranan seorang pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Faktor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan di dalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

B. Konsep Hegemoni

1. Pengertian Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut *eugemonia*. Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX dan di kemukakan oleh

Pandangan Gramsci, dalam Nezar Patria dan Andi Arief bahwa hegemoni bekerja dengan dua tahap yaitu tahap dominasi dan tahap pengarah atau kepemimpinan intelektual dan moral. Biasanya tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ideologi yang disusupkan lewat ide-ide tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Gramsci memandang bahwa dominasi merupakan awal hegemoni. Jika sudah melalui tahapan dominasi ini, maka tahap selanjutnya tinggal mengarahkan sebuah bentuk ketundukan kelas yang didominasi pada kelas yang mendominasi. Siapa yang mencoba melawan hegemoni dianggap orang yang tidak taat terhadap aturan, moral serta konsensus. Bahkan dianggap dari penyelewengan dan pembangkangan.

Melalui konsep ini Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement* (penegakan hukum). Perangkat kerja yang satu ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi, dan bahkan penjara. *Kedua*, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat kepada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil

dari sini Gramsci mengatakan bahwa Negara merupakan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, dimana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuatan diluarnya. Karena pencapaian kekuasaan Negara akan muncul setelah penegakan hegemoni dilakukan.

Praktik hegemoni dilakukan secara terus menerus terhadap kekuatan oposisi untuk mau memilih sikap konformistik, sehingga menimbulkan disiplin diri untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang diputuskan oleh negara dengan keyakinan bahwa apa yang telah diputuskan negara tersebut merupakan cara terbaik untuk bertahan (*survive*) dan meraih kesejahteraan. Gramsci hendak memperlihatkan peran kaum intelektual yang bekerja atas nama kapitalisme dengan menempuh kepemimpinan budaya dengan persetujuan massa. Kepemimpinan budaya harus hadir jika ingin revolusi berhasil, karena menurutnya revolusi tidak cukup dilakukan dengan cara menguasai ekonomi dan aparaturnya tidak seperti pandangan Marx.

3. Hegemoni Konsensus

Hegemoni sebagai kelas yang berkuasa terhadap kelas yang lainnya, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tatanan hegemonis menurut Gramsci, tidak perlu masuk

Gramsci menekankan bahwa pertentangan kelas itu secara efektif dinetralisasikan dalam masyarakat kapitalis. Sebab dengan pengawasan yang ketat dari kaum borjuis, pertentangan itu melemah dan menjadi keinginan akan gaji atau upah yang lebih baik. Pertentangan tinggalah sebuah ilusi. Ini menurut Gramsci merupakan “konsensus” terselubung dan hanya memperkuat hegemoni borjuis dengan mengaburkan sifat-sifat yang sesungguhnya. Inilah kemudian yang menurut Gramsci disebut gejala integrasi budaya.

Ada dua hal mendasar menurut Gramsci menjadi biang keladinya, yaitu pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di lain pihak. Untuk itu Gramsci mengatakan bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, Gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi “tangan—tangan” kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkungannya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.

Sampai di sini Gramsci mengambil kesimpulan bahwa watak konsensus massa dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*). Artinya, hegemoni yang dilakukan oleh kelas borjuis adalah hasil dari sebuah konsensus yang samar-samar. Berdasarkan realitas itu, secara kritis Femia berhasil menangkap derajat atau tingkatan hegemoni hasil konsensus massa.

bentuk di atas. Situasi seperti inilah yang terjadi di Italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad ini. Hegemoni bersandarkan pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemoni tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan “negara baru” yang di cita-citakan oleh kelompok hegemonis itu

Sebagaimana telah disebutkan bahwa secara umum, desa ini dapat dibilang sebagai desa yang rendah dan memiliki dua iklim sebagaimana umumnya iklim di Madura, khususnya Sumenep, yaitu musim *nambere'* (penghujan) dan musim *nemor* (panas). Ketika musim panas tiba, desa ini tidak terlalu sulit mencari air karena setiap warga hampir semuanya memiliki sumur sendiri-sendiri. Di samping itu, air sungai yang sangat besar biasanya tidak sampai habis, lebih-lebih di bagian timur desa Nyabakan Barat karena ada aliran sungai yang cukup besar dan terus berisi air. Sedangkan di bagian barat desa, sedikit lebih gersang dan mengandalkan air sumur.

Tapi sebaliknya, ketika musim *nambere'* tiba, desa ini menjadi lebih subur dan semua lahan ditanami dengan aneka tanaman, mulai dari ubi-ubian, jagung, padi, tembakau dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa dusun yang harus bersiap dengan datangnya banjir ketika musim penghujan telah tiba, khususnya dusun yang terletak di sawahan

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Nyabakan Barat

Sebagaimana masyarakat di Batang-Batang pada umumnya, mata pencaharian masyarakat di desa Nyabakan Barat lebih cenderung bergantung pada pertanian sebagai masyarakat agraris. Pola dan macam pertanian inilah yang memberikan sumbangan berarti dalam masyarakat sekitar, mulai dari jagung, padi, tembakau, kacang-kacangan, ubi, ketela, singkong, dan lainnya.

Menurut tanggapan dari ketua bajing dan Pak Abdurahman memang terdapat banyak perbedaan mencolok antara kepala desa yang dulu dengan yang sekarang, wajar saja desa tidak aman saat masa kepemimpinan kepala desa yang dulu karena bajing dan warga desa tidak menyukai karena sikapnya yang terdengar sedikit arogan dan sombong.

Tidak ada cara yang mampu mengatasi keamanan kecuali dengan menjadikan bajingan sebagai aktor penjaga keamanan dan stabilitas desa. Asumsinya dengan cara tersebut diharapkan meminimalisir kriminalitas dan tindakan premanisme. Kepala desa Nyabakan Barat salah satu caranya menjadikan bagian penting dilimpah tugaskan peranan pemelihara stabilitas desa Nyabakan Barat. Posisi penting seperti beberapa kepala dusun (kasun) secara formal diposisikan untuk menjalankan amanat stabilitas desa dengan cara mengkoordinir bajingan yang lain untuk tidak mengganggu desa Nyabakan Barat bahkan menghimbau untuk membantu menjaganya.

Dalam hal ini kepala desa memberikan peranan penting kepada ketua bajingan yakni mengangkatnya sebagai salah satu aparatur desa agar ikut serta memaksimalkan peranannya sebagai ketua bajingan untuk menjaga keamanan desa Nyabakan barat.

Perihal peranan akan terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya jika didukung fasilitas peranan. Pada konteks ini, bajingan di desa Nyabakan Barat diakomodir ketua bajingan yang berposisi sebagai kepala dusun dengan

kekuatan kelas. Disanalah kesepakatan dan kompromi terjalin antara kedua belah pihak baik disadari atau tidak. Benar Gramsci meyakinkan bahwa persoalan hegemoni disini tidak hanya menentukan penguasa dalam membenaran untuk mempertahankan dominasi bahkan lebih dari pada itu penguasa ingin mengatur untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuatan diluarnya.

Konteks pada Nyabakan Barat menjadi sangat realistis bahwa yang diharap antara penguasa kepala desa dengan bajingan bahkan dengan masyarakat sekalipun untuk memaksakan secara aktif pengaruh kekuasaannya. Oleh karena itu isu keamanan menjadi suatu hal yang anomali bagi masyarakat sehingga dengan kesadaran tersendiri masyarakat setuju dengan modal kerja sama penguasa dan bajingan untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan. Meski pemerintahan desa diuntungkan dalam hal ini ada kekuasaan yang lebih diuntungkan lagi dari bajingan itu sendiri.

Praktik dominasi dilakukan secara *sustainable* atau *kontinu* baik untuk yang dikuasai atau bagi mereka yang menentang kekuasaan. Keadaan tidak aman dipaksakan oleh pihak bajingan di desa Nyabakan Barat sebagai bentuk dominasi.

Bajingan memilih untuk terus mengerjakan tindakan premanismenya pada masa sebelum kepala desa sekarang sehingga keadaan ini dilihat oleh masyarakat sebagai masalah pemerintahan sehingga baik secara intelektual atau norma harus dicari jalan keluarnya untuk menciptakan pemerintahan

Tabel 2

Dominasi bajingan desa Nyabakan Barat

NO	Aktor	Peran	Dominasi
1	Bajingan yang menjadi aparatur desa	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator para Bajingan - Distriusi sumber-sumber material untuk para bajingan berupa sembako , sejumlah uang rupiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap peranan bajingan - Mendikte pemerintah untuk melakukan deal-deal politik secara tidak langsung berupa jabatan kasun agar dipegang untuk salah satu bajingan
2	Bajingan bukan aparatur	Kaki tangan ketua bajingan	Menakut-nakuti masyarakat tentang aksi kriminal termasuk pencurian dan kekerasan

Dominasi yang dilakukan elit Bajingan desa Nyabakan Barat dilakukan dengan persuasif, bukan melalui kekerasan atau paksaan. Elit Bajingan memanfaatkan kepala desa dan telah menerima cara pandang elit Bajingan untuk berusaha menguasai rakyat dengan cara menguasai pola pikirnya. Selain

